

Nazaruddin Pakedo: Jejak Perintis yang Menyulam Pendidikan dan Pemerintahan di Palu, Sulawesi Tengah



Palu - Di balik bangunan pemerintahan dan ruang-ruang kuliah di Kota Palu ada jejak-jejak tokoh daerah yang kerap luput dari sorotan besar sejarah nasional. Salah satunya adalah **Nazaruddin Pakedo**, nama yang berulang muncul dalam narasi sejarah daerah sebagai aktor penting pada masa pembentukan jaringan intelektual dan kaderisasi di Palu. Meski dokumen formalnya terbatas, peran Nazaruddin Pakedo terutama pada ranah organisasi kemahasiswaan menunjukkan bagaimana ruang non-formal turut membentuk wajah pendidikan dan pemerintahan daerah.

Lahirnya sebuah gerakan intelektual lokal

Penting memahami bahwa Palu pada awal 1960-an adalah kota yang sedang mencari pijakan administratif dan kultural. Setelah Sulawesi Tengah terbentuk sebagai provinsi pada tahun 1964, kebutuhan akan institusi pendidikan, organisasi sosial, dan kepemimpinan lokal menjadi mendesak. Di sinilah organisasi seperti **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)** masuk sebagai wahana penting: bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi sekolah kepemimpinan yang memproduksi kader untuk berbagai peran publik.

Dokumen sejarah organisasi mencatat satu fakta penting: **pembentukan HMI Cabang Palu terkait dengan Mandat Pengurus Besar HMI Nomor 1938/Sek/B/1965 (24 Februari 1965)**. Nama **Nazaruddin Pakedo** tercantum dalam kaitan tersebut sebagai salah satu figur yang terlibat dalam proses penerimaan mandat dan perintisan cabang. Keterlibatan ini menempatkannya dalam lingkaran awal yang merancang dan menumbuhkan jejaring intelektual di kota itu.

Pendidikan bukan selalu soal ijazah formal

Ketika kita berbicara soal kontribusi terhadap pendidikan, seringkali yang terbayang adalah sekolah, kurikulum, atau jabatan resmi di dinas pendidikan. Namun pengalaman Palu menunjukkan dimensi lain: **pendidikan non-formal** diskusi, pelatihan kader, kegiatan keilmuan seringkali punya dampak yang tak kalah luas.

Melalui perannya pada proses pembentukan HMI Cabang Palu, Nazaruddin Pakedo berkontribusi pada pembentukan “sekolah” alternatif: tempat di mana generasi muda dilatih berbicara di depan publik, mengorganisasi, dan memahami relasi antara masyarakat dan negara. Banyak alumni organisasi semacam ini akhirnya menempati posisi di pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, sebuah bentuk kontribusi struktural yang nyata meski tidak selalu terekam dalam surat keputusan resmi.

Di antara pemerintahan dan ruang publik

Beberapa catatan lisan dan tulisan populer menyebut Nazaruddin Pakedo sebagai figur yang memiliki kedekatan atau pengaruh dalam konteks pemerintahan daerah pada dekade pasca-1960-an. Namun penting dicatat: hingga saat ini belum ditemukan arsip publik *daring/online* seperti SK pengangkatan atau daftar pejabat resmi yang secara eksplisit menyatakan jabatan formal yang pernah dipegangnya dalam pemerintahan.

Itu bukanlah hal yang tak lazim pada studi sejarah daerah. Banyak tokoh yang berperan sebagai “penghubung” antara aktivisme intelektual dan struktur birokrasi muncul lewat jejaring sosial, rekomendasi, atau peran informal yang justru menentukan arah kebijakan setempat. Dalam kerangka ini, posisi Nazaruddin Pakedo lebih tepat digambarkan sebagai bagian dari ekosistem pengaruh, sosok yang membangun kemampuan dan jejaring yang kelak dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah.

Sebuah video singkat yang kini viral menampilkan Nazaruddin Pakedo, tokoh pemerintahan dan pendidikan asal daerah Sulawesi Tengah yang menanggapi pernyataan kontroversial Gubernur Sulawesi Tengah yang ke-4, Mayjen TNI Munafri, mengenai adanya “banyak kotoran kuda dijalanan”. Dalam video itu Nazaruddin Pakedo tampil tegas, menuntut klarifikasi dan meminta agar pejabat publik dari pusat menjaga tutur kata demi martabat warga daerah dikala itu.

Sumber video : <https://www.instagram.com/reel/DIcriUCt6J6/>

Mengapa cerita-cerita seperti ini penting?

Karena mereka mengubah cara kita memahami perubahan sosial: tidak selalu berasal dari kebijakan besar atau nama-nama yang tercetak di monumen, tetapi juga dari ruang-ruang diskusi kecil, sekretariat organisasi, dan gagasan yang disebar dari mulut ke mulut. Nazaruddin Pakedo adalah contoh figur yang mungkin kurang terlihat di arsip formal, tetapi berperan signifikan dalam jangka panjang, melalui pembentukan kader, jaringan, dan budaya intelektual serta merupakan contoh pejabat daerah yang berani dan bijak dalam mengambil keputusan, memberikan landasan bagi Generasi Pemimpin Daerah dimasa mendatang.

Batas bukti dan ajakan untuk menyelami arsip

Penulisan sejarah yang baik mensyaratkan kesetiaan pada sumber. Fakta terkuat yang saat ini tersedia terkait Nazaruddin Pakedo adalah keterkaitannya dengan proses pendirian HMI Cabang Palu pada 1965. Klaim lain termasuk pernyataan tentang jabatan formal di pemerintahan atau peran sebagai pendiri lembaga pendidikan formal masih memerlukan verifikasi melalui arsip primer: surat keputusan, notulen DPRD, koleksi koran lokal lama, atau rekaman lisan dari orang-orang sezaman.

Untuk pembaca dan peneliti, ini adalah undangan: menelusuri **arsip pemerintah daerah Kota Palu**, menggali **kumpulan koran lama**, menanyakan pada **almamater HMI** maupun **perpustakaan Universitas Tadulako**, atau melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang masih hidup yang mengenal perjalanan organisasi di masa itu. Setiap file, setiap lembar berita lama, dan setiap ingatan kolektif dapat menambahkan fragmen penting pada mozaik sejarah yang lebih besar.

Penutup: dari sekretariat kecil ke ruang-ruang pemerintahan

Nazaruddin Pakedo, sebagaimana tercantum dari sumber yang ada, mewakili jenis kepeloporan yang sering bekerja di balik layar: membangun organisasi, menyiapkan kader, dan menenun jejaring yang suatu hari akan menopang pemerintahan dan institusi pendidikan. Menceritakan tokoh seperti Nazaruddin Pakedo berarti mengakui peran aktor-aktor putera(i) daerah dalam menata masa depan daerah, bukan sekadar memberi label pada jabatan, melainkan menyaring proses sosial yang melahirkan perubahan. (*Anugerah Perdana Singi*)

Rujukan & Sumber

1. *Sejarah HMI MPO Cabang Palu*, dokumen sejarah organisasi (termasuk Mandat PB HMI Nomor 1938/Sek/B/1965, 24 Februari 1965).
2. Tulisan sejarah lokal: “Rusdy Toana Sang Tadulako HMI”, Mercusuar Online (mengulas dinamika awal HMI Palu dan tokoh sezaman).